



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253004 (8 saluran) Ext. 363 Faksimile (021) 5253139

PENGUMUMAN

NOMOR : SEK.KP.02.01-773

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2018

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN)

A. Unit Pusat

1. Sekretariat Jenderal.
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
5. Direktorat Jenderal Imigrasi.
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.
8. Inspektorat Jenderal.
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat (Rumah Detensi Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Harta Peninggalan dan Balai Diklat).

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS FORMASI DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI	JENIS FORMASI DAN ALOKASI FORMASI	PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA			2.000		
1	Analisis Hukum	S-1 Hukum (Jurusan Perdata/ Pidana/ Tata Negara/ Administrasi Negara/ Hukum Internasional/ Praktisi Hukum) / Hubungan Internasional	275	8 Cumlaude ; 8 Disabilitas; 4 Putra/Putri Papua; 255 Umum	9 Unit Pusat, 5 BHP (DKI Jakarta, Medan, Makasar, Surabaya, Semarang), dan 32 Kantor Wilayah
2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Hukum (Jurusan Perdata/ Pidana/ Tata Negara/ Administrasi Negara/ Praktisi Hukum) / Administrasi Publik/ Ilmu Pemerintahan/ Ilmu Administrasi Negara/ Manajemen dan Kebijakan Publik	12	2 Disabilitas ; 10 Umum	1 Unit Pusat (Balitbang Hukum dan HAM)
3	Analisis Kekayaan Intelektual	S-1 Teknik, Design Grafis, Design Komunikasi Visual, Hukum (Jurusan Perdata/ Pidana/ Tata Negara/ Administrasi Negara/ Hukum Internasional/ Praktisi Hukum)/ Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen	17	Umum	1 Unit Pusat (Ditjen Kekayaan Intelektual)
4	Analisis Kelembagaan	S-1 Hukum (Jurusan Perdata/ Pidana / Tata Negara/ Administrasi Negara) / Studi (Ilmu) Pemerintahan / Manajemen SDM	4	Umum	1 Unit Pusat (Setjen)
5	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	S-1 Hukum (Jurusan Perdata/ Pidana/Tata Negara/ Administrasi Negara/ Hukum Internasional/ Praktisi Hukum)/ Manajemen SDM	124	5 Cumlaude ; 4 Putra/Putri Papua ; Umum 115	11 Unit Pusat dan 29 Kantor Wilayah
6	Analisis Kerjasama	S-1 Sastra Inggris / Sastra Cina / Sastra Mandarin / Sastra Arab / Sastra Jepang / Sastra Belanda / Sastra Korea / Hubungan Internasional / Hukum (Jurusan Perdata/ Pidana/Tata Negara/ Administrasi Negara/ Hukum Internasional/Praktisi Hukum)	26	Umum	8 Unit Pusat
7	Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran	S-1 Pengembangan Kurikulum / Penjamin Mutu Pendidikan/ D-IV Pengembangan Kurikulum	2	Umum	1 Unit Pusat (Poltekim & Poltekip PSDM Hukum dan HAM)
8	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	S-1 Akuntansi Komputer / Akuntansi / Hukum (Jurusan Perdata/ Pidana/ Tata Negara/ Administrasi Negara/ Praktisi Hukum)	11	Umum	1 Unit Pusat (Inspektorat Jenderal)
9	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	S-1 Studi (Ilmu) Pemerintahan/ Ekonomi Pembangunan/ Keuangan Publik / Sistem Informasi / Teknologi Informasi/ Ilmu Komputer (Informatika)/ Akuntansi / Akuntansi Komputer/ Hukum (Jurusan Perdata	86	3 Cumlaude ; 4 Putra/Putri Papua; 79 Umum	11 Unit Pusat dan 31 Kantor Wilayah

		/ Tata Negara/ Administrasi Negara/ Hukum Internasional)/ Administrasi Publik/ Ilmu Administrasi Negara/ Manajemen dan Kebijakan Publik			
10	Apoteker Ahli Pertama	S-1 Farmasi (Profesi Apoteker)	1	Umum	1 Unit Pusat (BPSDM Hukum dan HAM)
11	Assessor Sdm Aparatur Ahli Pertama	S-1 Psikologi / Hukum (Jurusan Perdata/ Pidana/ Tata Negara/ Administrasi Negara/ Praktisi Hukum)	8	2 Cumlaude; 6 Umum	1 Unit Pusat (BPSDM Hukum dan HAM)
12	Auditor Ahli Pertama	S-1 Hukum (Jurusan Perdata/ Pidana/ Tata Negara/ Administrasi Negara/ Praktisi Hukum) / Akuntansi/ Akuntansi Komputer / Manajemen SDM	18	3 Cumlaude ; 15 Umum	1 Unit Pusat (Inspektorat Jenderal)
13	Dokter Ahli Pertama	Dokter	2	Umum	1 Unit Pusat (Poltekip dan Poltekim BPSDM Hukum dan HAM)
14	Dosen Asisten Ahli	S-2 Ilmu Komputer Atau Informatika/ Rekayasa Perangkat Lunak/ Rekayasa Sistem Komputer/ Sistem Informasi/ Teknologi Informasi/ Pendidikan Komputer/ Informatika	3	Umum	1 Unit Pusat (Poltekip dan Poltekim BPSDM Hukum dan HAM)
	Dosen Asisten Ahli	S-2 Ilmu Administrasi Publik / Administrasi Negara / Ilmu Administrasi Kekhususan Publik atau Good Governance	2	Umum	1 Unit Pusat (Poltekip dan Poltekim BPSDM Hukum dan HAM)
	Dosen Asisten Ahli	S-2 Administrasi Bisnis /Akuntansi / Manajemen Pajak / Administrasi Pajak	1	Umum	1 Unit Pusat (Poltekim BPSDM Hukum dan HAM)
	Dosen Asisten Ahli	S-2 Bimbingan Dan Konseling/ Psikologi	2	Umum	1 Unit Pusat (Poltekip dan Poltekim BPSDM Hukum dan HAM)
	Dosen Asisten Ahli	S-2 Hukum (Menguasai Hukum Laut Dan Hukum Internasional)	1	Umum	1 Unit Pusat (Poltekim BPSDM Hukum dan HAM)
	Dosen Asisten Ahli	S-2 Kriminologi/Sosiologi	2	Umum	1 Unit Pusat (Poltekip BPSDM Hukum dan HAM)
15	Kustodian Kekayaan Negara	S-1 Akuntansi/ Akuntansi Komputer/ Hukum (Jurusan Perdata/ Pidana/ Tata Negara/ Administrasi Negara/ Praktisi Hukum)	90	25 Cumlaude ; 4 Putra/Putri Papua / 61 Umum	9 Unit Pusat dan 29 Kantor Wilayah
16	Penata Keuangan	S-1 Akuntansi	66	25 Cumlaude ; 3 Disabilitas ; 4 Putra/Putri Papua ; 34 Umum	29 Kantor Wilayah
17	Peneliti Ahli Pertama	S-1 Hukum (Jurusan Perdata/ Pidana/ Tata Negara/ Administrasi Negara/ Hukum Internasional/ Praktisi Hukum)	12	4 Disabilitas ; 8 Umum	1 Unit Pusat (Balitbang Hukum dan HAM)
18	Pengelola Data	D-III Sistem Informasi / Teknologi Informasi / Manajemen Informatika / Administrasi / Akuntansi / Akuntansi Komputer / Sekretaris	54	2 Disabilitas ; 52 Umum	6 Unit Pusat

19	Pengelola Gizi	D-III Gizi	2	Umum	1 Unit Pusat (Ditjen Pemasyarakatan)
20	Pengelola Keuangan	D-III Akuntansi / Akuntansi Komputer/ Keuangan / Manajemen Informatika /Teknologi Informasi / Teknik Informatika / Administrasi Bisnis / Administrasi	144	144 Umum	10 Unit Pusat, 106 Kanim seluruh provinsi dan 5 BHP (DKI Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya , Makasar)
21	Pengelola Program dan Kegiatan	S-1 Administrasi Pendidikan / Manajemen SDM / Hukum (Jurusan Perdata/ Pidana/ Tata Negara/ Administrasi Negara/ Hukum Internasional/ Praktisi Hukum) D-IV Pengembangan Kurikulum	4	Umum	1 Unit Pusat (BPSDM Hukum dan HAM)
22	Pengelola Tata Naskah	D-III Sistem Informasi / Teknologi Informasi / Teknik Informatika / Manajemen Teknik Informatika / Manajemen Informatika / Ilmu Pemerintahan / Perkantoran / Akuntansi/ Akuntansi Komputer/ Administrasi / Sekretaris	19	2 Disabilitas ; 17 Umum	11 Unit Pusat dan 3 Balai Diklat (Kepri, Jateng dan Sulut)
23	Pengelola Teknologi Informasi	S-1 Teknologi Informasi / Sistem Informasi / Sistem dan Teknologi Informasi / Ilmu Komputer (Informatika) / Sistem Komputer / Manajemen Informatika / Teknologi Informatika	77	2 Disabilitas, 20 Cumlaude, 4 Putra/Putri Papua, 51 Umum	1 Unit Pusat (Setjen) dan 33 Kantor Wilayah
24	Penjaga Tahanan	SLTA Sederajat	878	Wanita 211 ; Pria 633 ; Putra/Putri Papua Wanita 8; Putra Putri Papua Pria 26	Lapas, Rutan dan Rudenim
25	Penyusun Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria	S-1 Hukum (Jurusan Perdata/ Pidana/ Tata Negara/ Administrasi Negara/ Hukum Internasional/ Praktisi Hukum) / Studi (Ilmu) Pemerintahan / Administrasi Publik / Ilmu Administrasi Negara / Manajemen Dan Kebijakan Publik	17	Umum	6 Unit Pusat
26	Perawat Ahli Pertama	S-1 Keperawatan + Ners	4	Umum	1 Unit Pusat (Poltekip dan Poltekim BPSDM Hukum dan HAM)
27	Pranata Humas Ahli Pertama	S-1 Ilmu (Sains) Komunikasi / Design Komunikasi Visual / Hubungan Masyarakat / Jurnalistik / Komunikasi Massa / Manajemen Komunikasi / Sastra Inggris / Sastra Cina / Sastra Mandarin / Sastra Arab / Sastra Jepang / Sastra Belanda / Sastra Korea	11	2 Cumlaude ; 9 Umum	4 Unit Pusat
28	Pranata Sidik Jari	D-III Sistem Informasi / Teknologi Informasi / Manajemen Informatika/ Administrasi/ Ilmu Komputer/ Akuntansi	2	Umum	1 Unit Pusat (Ditjen Pemasyarakatan)

29	Teknisi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	D-III Akuntansi Komputer /Teknik Elektro / Teknologi Elektronika / Teknik Elektronika / Teknik Listrik / Teknologi Informatika Khusus Jaringan	20	Umum	9 Unit Pusat
30	Pustakawan Ahli Pertama	S-1/ D-IV Perpustakaan/ Kearsipan	3	Umum	1 Unit Pusat (BPHN)

III. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan di peruntukan bagi pelamar dengan Jenis formasi :
 - a. Khusus *Cumlaude* adalah pelamar lulusan terbaik (*Cumlaude/ dengan pujian*) dari Perguruan Tinggi terakreditasi A / Unggul dan Program Studi terakreditasi A / Unggul pada saat Kelulusan dan dibuktikan dengan adanya kata "*Cumlaude/ pujian*" pada ijazah atau transkrip nilai.
 - b. Khusus Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas / berkebutuhan khusus dengan kriteria:
 - mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
 - mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
 - Mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda.
 - c. Khusus Putra / Putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar dengan kriteria garis keturunan orang tua (bapak dan/ ibu) asli Papua yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/ Kepala Suku yang menyatakan bahwa pelamar memiliki orang tua (bapak dan/ ibu) asli papua;
 - d. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b dan c diatas namun apabila ada pelamar pada huruf a, b dan c diatas ingin melamar formasi umum dapat diperbolehkan dan wajib mengikuti segala ketentuan yang berlaku pada formasi umum.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

IV. PERSYARATAN PELAMARAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memiliki Karakteristik Pribadi selaku penyelenggara Pelayanan Publik;
3. Mampu berperan sebagai perekat NKRI;
4. Memiliki Intelektualitas yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI / POLRI, Pegawai BUMN / BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
7. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah;

8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Sehat jasmani, rohani dan jiwa/mental (Surat Keterangan sehat jasmani dari dokter umum dan Surat Keterangan sehat mental dari dokter spesialis jiwa RS pemerintah wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/ NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
12. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
13. Bagi Wanita tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
14. Pelamar merupakan lulusan :
 - a. Jenis Formasi Umum
 - 1) Perguruan Tinggi Luar Negeri Magister, Dokter, Keperawatan, Sarjana/ S-1/ D-IV dan Diploma III/ D-III dengan ijazah dan transkip nilai telah disetarakan oleh Kemenristekdikti dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima).
 - 2) Perguruan Tinggi Dalam Negeri Magister, Dokter, Keperawatan, Sarjana/ S-1/ D-IV dan Diploma III/D-III dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima).
 - 3) SLTA Sederajat dari sekolah luar negeri yang telah disetarakan Ijasah dan Daftar Nilai yang terdapat pada Ijasah/ Transkip Nilai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan nilai minimal pada Ijazah rata-rata 7,0 (tujuh koma nol) atau 70 (tujuh puluh) atau 3 (tiga) skala 1 sampai 4 atau B. Khusus untuk pelamar dengan kategori Putra/Putri Papua dan Papua Barat dengan nilai minimal pada Ijazah rata-rata 6,0 (enam koma nol) atau 60 (enam puluh) atau 2 (dua) skala 1 sampai 4 atau C.
 - 4) SLTA sederajat yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau terdaftar di Kementerian Agama dengan nilai minimal pada Ijazah rata-rata 7,0 (tujuh koma nol) atau 70 (tujuh puluh) atau 3 (tiga) skala 1 sampai 4 atau B. Khusus untuk pelamar dengan kategori Putra/Putri Papua dan Papua Barat dengan nilai minimal pada Ijazah rata-rata 6,0 (enam koma nol) atau 60 (enam puluh) atau 2 (dua) skala 1 sampai 4 atau C.
 - b. Jenis Formasi *Cum Laude*
 - 1) Perguruan Tinggi Luar Negeri Sarjana/ S-1 yang telah memiliki surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan cum laude dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) asli.
 - 2) Perguruan Tinggi Dalam Negeri Sarjana/ S-1 dari perguruan tinggi dan program studi terbaik (*Cum laude/ dengan pujian*) dari Perguruan Tinggi terakreditasi A / Unggul dan Program Studi terakreditasi A / Unggul pada saat Kelulusan dan dibuktikan dengan adanya kata "*Cum laude/ pujian*" pada ijazah atau transkrip nilai.

c. Jenis Formasi *disabilitas*

1) Perguruan Tinggi Luar Negeri Sarjana/ S-1 dan Diploma III/ D-III dengan ijazah dan transkip nilai telah disetarakan oleh Kemenristekdikti dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) dan memiliki Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/ tingkat Disabilitasnya dari RS Pemerintah (ASLI)

2) Perguruan Tinggi Dalam Negeri Sarjana/ S-1 dan Diploma III/D-III dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam BAN-PT saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) dan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/ tingkat Disabilitasnya dari RS Pemerintah (ASLI).

d. Jenis Formasi Putra/I Papua

1) Perguruan Tinggi Luar Negeri Sarjana/ S-1 dengan ijazah dan transkip nilai telah disetarakan oleh Kemenristekdikti dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) dan memiliki surat keterangan asli dari kelurahan/ kepala desa/ kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/ ibu) asli dari Papua

2) Perguruan Tinggi Dalam Negeri Sarjana/ S-1 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam BAN-PT saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) dan memiliki surat keterangan asli dari kelurahan/ kepala desa/ kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/ ibu) asli dari Papua.

3) SLTA Sederajat dari sekolah luar negeri yang telah disetarakan Ijasah dan Daftar Nilai yang terdapat dalam Ijasah/ Transkip Nilai oleh Kemendikbud dengan nilai minimal pada Ijazah rata-rata 6,0 (enam koma nol) atau 60 (enam puluh) atau 2 (dua) skala 1 sampai 4 atau C dan memiliki surat keterangan asli dari kelurahan/ kepala desa/ kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/ ibu) asli dari Papua.

4) SLTA sederajat yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau terdaftar di Kementerian Agama dengan nilai minimal pada Ijazah rata-rata 6,0 (enam koma nol) atau 60 (enam puluh) atau 2 (dua) skala 1 sampai 4 atau C dan memiliki surat keterangan asli dari kelurahan/ kepala desa/ kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/ ibu) asli dari Papua.

15. Usia pada saat melamar (terhitung saat memilih instansi Kementerian Hukum dan HAM pada portal SSCN) adalah:

a. Minimal 18 tahun dan Maksimal 33 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk Magister, Dokter, Perawat, Sarjana / S-1 / D-IV.

b. Minimal 18 tahun dan Maksimal 30 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk Diploma III / D-III.

c. Minimal 18 tahun dan Maksimal 28 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk SLTA.

16. Tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan :

a. Pria minimal 160 cm

b. Wanita minimal 155 cm

17. Pelamar penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA Sederajat yang mendaftar pada Kantor Wilayah harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam eKTP. Apabila pelamar yang domisilinya tidak sesuai dengan eKTP dan ingin mendaftar pada wilayah domisilinya, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah tersebut.

18. Untuk Pelamar pada Penjaga Tahanan jenis formasi khusus putra/i Papua dan Papua Barat wajib berdomisili di Provinsi Papua dan Papua Barat.

V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://sscn.bkn.go.id> mulai tanggal 26 September s.d. 7 Oktober 2018 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (eKTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK).
2. Pada saat pendaftaran secara *online* melalui portal sebagaimana diatas, pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada KK atau nomor KK, alamat email aktif, membuat password dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto berlatar belakang merah berukuran 4 X 6 (Foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file Jpg) dan cetak Kartu Informasi Akun
3. Setelah itu pelamar kembali login ke portal diatas menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto diri pelamar yang sedang memegang Kartu Informasi Akun dan eKTP/ surat keterangan perekaman eKTP (foto selfie) sebagai bukti telah melakukan pendaftaran (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file Jpg), pelamar memilih instansi Kementerian Hukum dan HAM, jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data pada form yang tersedia khusus pelamar dengan jenjang pendidikan Magister, Dokter, Sarjana dan Diploma III wajib mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCN 2018.
4. Adapun khusus pelamar jenjang pendidikan SLTA sederajat tidak perlu mengunggah dokumen persyaratan, tetapi dokumen persyaratan tersebut harus dikirimkan kepada panitia daerah melalui PO. Box Kantor Wilayah yang ditunjuk sebagaimana terlampir.

B. Dokumen Persyaratan pelamar adalah :

1. Pelamar Jenis Formasi Umum dengan Kualifikasi Pendidikan Magister, Dokter, Sarjana/ S-1/ D-IV dan Diploma III:
 - a. Dokumen persyaratan terdiri dari:
 - 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan diktetik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format Surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh pada portal <https://sscn.bkn.go.id> dan/ atau laman <http://cpns.kemenkumham.go.id>) kedua dokumen dijadikan dalam 1 (satu) file.
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (eKTP) asli atau asli surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) / kecamatan bagi yang belum memiliki eKTP (1 (satu) file).
 - 3) Dokumen kelulusan pendidikan yang terdiri dari:
 - a) Ijasah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar, khusus pelamar Dokter, Perawat dan Apoteker menggunakan Ijasah Profesi disertai Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku asli.
 - b) Surat keputusan penyetaraan ijasah dari Kemenristekdikti asli bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri asli.

- c) Cetakan *Print screen* Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari BAN-PT yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi yang dikeluarkan oleh KemenRistekDikti yang dimiliki perguruan tinggi pelamar. (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijasah/transkrip tidak tercantum akreditasinya) (asli/ foto copy)
 - d) Dokumen diatas digabungkan kedalam 1 (satu) file
 - 4) Lulusan Dalam Negeri Transkrip Nilai Indek Prestasi Komulatif (IPK), bagi pelamar dokter, perawat dan apoteker menggunakan transkrip nilai ijasah profesinya ; Lulusan perguruan tinggi luar negeri menggunakan surat penyetaraan nilai (IPK) dari Kemenristekdikti asli.
- b. Unggah dokumen persyaratan lamaran pada point a soft file dengan format Pdf. dilakukan secara online melalui portal <https://sscn.bkn.go.id>;
 - c. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan lamaran dimulai pada tanggal 26 September s.d. 7 Oktober 2018 (ditutup pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 23.59 WIB);
 - d. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui portal: <https://sscn.bkn.go.id> dimulai pada tanggal 12 Oktober s.d. 22 Oktober 2018
- 2. Pelamar Jenis Formasi *Cumlaude* berpredikat *Cumlaude* atau dengan pujian Kualifikasi Pendidikan Sarjana/ S-1:
 - a. Dokumen persyaratan terdiri dari :
 - 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format Surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh pada portal <https://sscn.bkn.go.id> dan/ atau laman <http://cpns.kemenkumham.go.id>) kedua dokumen dijadikan/ digabung dalam 1 (satu) file.
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (eKTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/ kecamatan bagi yang belum memiliki eKTP.
 - 3) Dokumen kelulusan pendidikan yang terdiri dari:
 - a) Ijasah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar
 - b) Surat keputusan penyetaraan ijasah dari Kemenristekdikti asli bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri asli.
 - c) Cetakan *Print screen* Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari BAN-PT yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi yang dikeluarkan oleh KemenRistekDikti yang dimiliki perguruan tinggi pelamar. (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijasah/transkrip tidak tercantum akreditasinya) (asli/ foto copy)
 - d) Dokumen diatas digabungkan kedalam 1 (satu) file.
 - 4) Transkrip Nilai Indek Prestasi Komulatif (IPK) bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri sedangkan lulusan perguruan tinggi luar negeri menggunakan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *cumlaude* dari Kemenristekdikti asli.
 - b. Bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri pada ijasah atau transkip nilai IPK wajib memuat keterangan atau tulisan *cumlaude* atau dengan pujian
 - c. Unggah dokumen persyaratan lamaran pada point a soft file dengan format Pdf dan foto format Jpg dilakukan secara online melalui portal <https://sscn.bkn.go.id>;

- d. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan lamaran dimulai pada tanggal 26 September s.d. 7 Oktober 2018 (ditutup pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 23.59 WIB);
 - e. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui portal <https://sscn.bkn.go.id> dimulai pada tanggal 12 Oktober s.d. 22 Oktober 2018.
3. Pelamar Jenis Formasi Penyandang Disabilitas dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1 dan Diploma III:
- a. Dokumen persyaratan terdiri dari:
 - 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format Surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh pada portal <https://sscn.bkn.go.id> dan/ atau laman <http://cpns.kemenkumham.go.id>) kedua dokumen dijadikan dalam 1 (satu) file.
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (eKTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) / kecamatan bagi yang belum memiliki eKTP.
 - 3) Dokumen kelulusan pendidikan yang terdiri dari:
 - a) Ijasah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar
 - b) Surat penyetaraan ijasah dari Kemenristekdikti asli bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri asli.
 - c) Cetakan *Print screen* Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari BAN-PT yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi yang dikeluarkan oleh KemenRistekDikti yang dimiliki perguruan tinggi pelamar. (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijasah/transkrip tidak tercantum akreditasinya) (asli/ foto copy)
 - d) Dokumen diatas digabungkan kedalam 1 (satu) file.
 - 4) Lulusan Dalam Negeri Transkrip Nilai Indek Prestasi Komulatif (IPK) sedangkan lulusan perguruan tinggi luar negeri menggunakan surat penyetaraan nilai (IPK) dari Kemenristekdikti asli.
 - 5) Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/ tingkat Disabilitasnya dari RS Pemerintah *contoh terlampir* (ASLI).
 - b. Unggah dokumen persyaratan lamaran pada point a *soft file* dengan format Pdf dan foto format Jpg dilakukan secara *online* melalui portal: <https://sscn.bkn.go.id>;
 - c. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan lamaran dimulai pada tanggal 26 September s.d. 7 Oktober 2018 (ditutup pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 23.59 WIB);
 - d. Sebagaimana pengaturan dalam Permenpan RB Nomor 36 tahun 2018, peserta formasi penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus seleksi administrasi melalui verifikasi dokumen persyaratan secara unggah wajib hadir di masing-masing kanwil dimana peserta diabilitas berdomisili untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/ jenis/ kriteria disabilitasnya tanggal 15 s.d 17 Oktober 2018. Apabila hasil verifikasi tidak sesuai maka tidak dapat diberikan Kartu Peserta Ujian sedangkan yang sesuai akan diberikan Kartu Peserta Ujian untuk mengikuti Seleksi selanjutnya.

4. Pelamar Jenis Formasi Putra/putri Papua dan Papua Barat Kualifikasi Pendidikan Sarjana/ S-1:
 - a. Dokumen persyaratan terdiri dari :
 - 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan surat pernyataan diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format Surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh pada portal <https://sscn.bkn.go.id> dan/ atau laman <http://cpns.kemenkumham.go.id>) kedua dokumen dijadikan dalam 1 (satu) file.
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (eKTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) / kecamatan bagi yang belum memiliki eKTP (1 (satu) file).
 - 3) Dokumen kelulusan pendidikan yang terdiri dari:
 - a) Ijasah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar
 - b) Surat penyetaraan ijasah dari Kemenristekdikti asli bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri asli.
 - c) Cetakan *Print screen* Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari BAN-PT yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi yang dikeluarkan oleh KemenRistekDikti yang dimiliki perguruan tinggi pelamar. (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijasah/transkrip tidak tercantum akreditasinya) (asli/ foto copy)
 - d) Dokumen diatas digabungkan kedalam 1 (satu) file..
 - 4) Lulusan Dalam Negeri Transkrip Nilai Indek Prestasi Komulatif (IPK) sedangkan lulusan perguruan tinggi luar negeri menggunakan surat penyetaraan nilai (IPK) dari Kemenristekdikti asli
 - 5) Surat keterangan asli dari kelurahan/ kepala desa/ kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/ ibu) asli dari Papua
 - b. Unggah dokumen persyaratan lamaran pada point a *soft file* dengan format Pdf dan foto format Jpg dilakukan secara *online* melalui portal: <https://sscn.bkn.go.id>;
 - c. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan lamaran dimulai pada tanggal 26 September s.d. 7 Oktober 2018 (ditutup pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 23.59 WIB);
 - d. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui portal : <https://sscn.bkn.go.id> dimulai pada tanggal 12 Oktober s.d. 22 Oktober 2018.
5. Pelamar Jenis Formasi Umum dengan Kualifikasi Pendidikan SLTA Sederajat :
 - a. Dokumen persyaratan yang dikirim terdiri dari :
 - 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam yang (ASLI, format surat lamaran dapat diunduh di portal : <https://sscn.bkn.go.id> dan/atau laman <http://cpns.kemenkumham.go.id>)
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (eKTP) atau Fotocopy Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/ kecamatan bagi yang belum memiliki eKTP.
 - 3) Apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat eKTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili ditempat tersebut (fotocopy).

- 4) Fotokopi Ijazah/ STTB dan Fotocopy Daftar Nilai/Transkip Nilai yang terdapat pada Ijazah/ STTB SLTA sederajat (Ijasah dan daftar nilai/ transkip nilai harus berbahasa Indonesia).
 - 5) Fotokopi Surat Penyetaraan Ijasah dan Transkip Nilai dari KemenDikbud (lulusan Luar Negeri) atau Kementerian Agama (lulusan Pesantren).
 - 6) Surat Pernyataan harus diketik menggunakan komputer, ditandatangani diatas materai 6000 oleh pelamar dengan pena berwarna hitam (asli, format surat pernyataan dapat diunduh di portal <https://sscn.bkn.go.id>).
 - 7) Pas photo terbaru berlatar belakang warna merah 3 x 4 sebanyak 2 buah.
 - 8) Fotokopi Lembar bukti pendaftaran yang dicetak dari portal <https://sscn.bkn.go.id>.
- b. Batas waktu pendaftaran dimulai pada tanggal 26 September s.d. 7 Oktober 2018 (ditutup tanggal 7 Oktober 2018 pukul 23.59 WIB).
 - c. Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan oleh panitia daerah melalui Po. Box pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 16.00 waktu setempat (cap pos diterima di PO. Box).
 - d. Pemanggilan peserta dalam seleksi administrasi Verifikasi Dokumen atau Berkas Asli dan Pengukuran Tinggi Badan dan Pemberian Kartu Peserta Ujian dimulai pada tanggal 15 Oktober - 17 Oktober 2018.
6. Pelamar Jenis Formasi Khusus Putra/putri Papua dan Papua Barat dengan Kualifikasi Pendidikan SLTA Sederajat :
 - a. Dokumen persyaratan terdiri dari :
 - 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam yang (ASLI, format surat lamaran dapat diunduh di portal: <https://sscn.bkn.go.id> dan/atau laman <http://cpns.kemenkumham.go.id>)
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (eKTP) atau Fotocopy Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/ kecamatan bagi yang belum memiliki eKTP.
 - 3) Apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat eKTP, yang bersangkutan harus membuat surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili di tempat tersebut (fotocopy).
 - 4) Fotocopy Surat keterangan dari kelurahan / kepala desa / kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/ ibu) asli dari Papua.
 - 5) Fotokopi Ijazah/ STTB dan Fotocopy Daftar Nilai/Transkip Nilai yang terdapat pada Ijazah/ STTB SLTA sederajat (Ijasah dan daftar nilai/ transkip nilai harus berbahasa Indonesia).
 - 6) Fotokopi Surat Penyetaraan Ijasah/ Transkip Nilai dari KemenDikbud (lulusan Luar Negeri) atau Kementerian Agama (lulusan Pesantren).
 - 7) Surat Pernyataan harus diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna hitam (ASLI, format surat pernyataan dapat diunduh di portal : <https://sscn.bkn.go.id>).
 - 8) Pas photo terbaru berlatar belakang warna merah 3 x 4 sebanyak 2 buah.
 - 9) Fotokopi Kartu Pendafatran SSCN 2018 yang dicetak dari portal <https://sscn.bkn.go.id> .

- b. Batas waktu pendaftaran dimulai pada tanggal 26 September s.d. 7 Oktober 2018 (ditutup tanggal 7 Oktober 2018 pukul 23.59 WIB).
- c. Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan oleh panitia daerah melalui PO. Box pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 16.00 waktu setempat (cap pos diterima di PO. Box).
- d. Pemanggilan peserta dalam seleksi administrasi Verifikasi Dokumen atau Berkas Asli dan Pengukuran Tinggi Badan dan Pemberian Kartu Peserta Ujian dimulai pada tanggal 15 Oktober - 17 Oktober 2018.

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi Magister, Dokter, Sarjana / S-1 / D-IV dan Diploma III / D-III (jenis formasi umum, *Cumlaude* dan Putra/putri Papua dan Papua Barat)
 - a. Seleksi Administrasi Dokumen persyaratan Unggah
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT)
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
 - Substansi Jabatan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 75%.
 - Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPKF) dengan bobot 25%.
 - d. Khusus pelamar jabatan Pengelola Teknologi Informasi, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
 - Praktik Komputer dengan bobot 40%.
 - Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPKF) dengan bobot 40%.
 - Bahasa Inggris menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 20%
 - e. Khusus pelamar jabatan Dosen Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
 - Praktik Mengajar dengan bobot 40%.
 - Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPKF) dengan bobot 40%.
 - Bahasa Inggris menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 20%
2. Tahapan Seleksi Diploma III dan Sarjana/ S-1 (jenis formasi penyandang disabilitas):
 - a. Seleksi Administrasi:
 - Verifikasi dokumen persyaratan unggah.
 - Verifikasi kesesuaian tingkat/ jenis/ kriteria penyandang disabilitas.
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
 - Substansi Jabatan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 75%.
 - Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPKF) dengan bobot 25%.
 - d. Khusus pelamar jabatan Pengelola Teknologi Informasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
 - Praktik komputer dengan bobot 40%.
 - Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPKF) dengan bobot 40%.
 - Bahasa Inggris menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 20%
3. Tahapan Seleksi SLTA / Sederajat (Jenis Formasi Umum dan Khusus Putra/I Papua dan Papua Barat)
 - a. Seleksi Administrasi terdiri dari :
 - Verifikasi dokumen lamaran yang diterima melalui PO. Box
 - Verifikasi dokumen asli dan Pengukuran tinggi badan
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
 - Kesamaptaan dengan bobot 60%.
 - Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPKF) dengan bobot 40%.

4. Lokasi pelaksanaan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan pada 33 (tiga puluh tiga) kota provinsi sesuai dengan hal sebagai berikut :
 - a. Bagi pendaftar penjaga tahanan, kota provinsi lokasi pelaksanaan seleksi sesuai dengan domisili pada eKTP atau surat keterangan domisili
 - b. Bagi pendaftar penjaga tahanan formasi putra/i Papua dan Papua Barat, kota provinsi lokasi pelaksanaan seleksi yaitu papua atau papua barat sesuai dengan domisili pada eKTP atau surat keterangan domisili
 - c. Bagi pendaftar selain penjaga tahanan, kota provinsi lokasi pelaksanaan seleksi sesuai dengan kota provinsi yang dipilih sebagai lokasi seleksi kompetensi dasar (SKD) pada di portal <https://sscn.bkn.go.id>

VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi Administrasi pada jabatan jenjang pendidikan Magister/ S.2, Dokter, Sarjana/S.1/ D.IV, Diploma III/ D-III jenis formasi umum, *Cumlaude*, disabilitas dan Putra/putri Papua dan Papua Barat didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam portal SSCN sebagaimana dalam pengumuman. Khusus penyandang disabilitas, selain berdasarkan kesesuaian data dan dokumen juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian tingkat/ jenis kriteria penyandang disabilitas.
2. Kelulusan seleksi Administrasi pada jenjang pendidikan SLTA Sederajat didasarkan pada kesesuaian data yang terdapat dalam portal SSCN, dokumen PO. Box, dokumen asli dan tinggi badan pada saat pengukuran dengan data dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengumuman.
3. Bagi peserta setelah dilakukan verifikasi sebagaimana diatas tidak sesuai dengan persyaratan dalam pengumuman maka pendaftar tersebut tidak dapat diberikan kartu peserta ujian/ dinyatakan gugur, sedangkan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan mendapatkan kartu peserta ujian dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
4. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 37 Tahun 2018.
5. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada satu jabatan dengan memperhatikan jenis formasi yang sama dan pengelompokan yang sama (jenis formasi dan pengelompokan terlampir).
6. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 36 Tahun 2018 dengan memperhatikan jenis formasi yang sama dan pengelompokan yang sama (jenis formasi dan pengelompokan terlampir).
7. Dalam hal formasi umum tidak terpenuhi dapat diisi dari formasi khusus dan apabila kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi dapat diisi pendaftar dari formasi umum sepanjang dalam jabatan yang sama, memenuhi nilai ambang batas kelulusan peringkat terbaik setelah mendapatkan persetujuan dari Panselnas.

VIII. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1(satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan
3. Terhadap file unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas oleh panitia dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang dikirim/diunggah sehingga mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus merupakan kelalaian peserta, panitia tidak bertanggungjawab.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijasah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi perguruan tinggi dinyatakan bahwa Ijasah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi serta penerbitan Ijasah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran sehingga surat keterangan lulus (SKL) tidak berlaku sebagai dokumen tertulis dalam rangka pendaftaran seleksi.
5. Jabatan penjaga tahanan memiliki jam kerja yang menggunakan pola 3-4 shift, sehingga tidak mengenal hari libur (tanggal merah) termasuk hari libur nasional. Dengan pola jam kerja tersebut, dimungkinkan seorang penjaga tahanan bertugas pada malam hari sampai dini hari untuk mengawasi/ menghadapi warga binaan pemasarakatan (tahanan/ narapidana). Oleh karena itu, selain dibutuhkan intelektual dan integritas seorang penjaga tahanan harus memiliki fisik yang prima yang dapat disaring melalui seleksi kompetensi bidang kesamaptaan.
6. Guna menggali tingkat kemampuan samapta sebagaimana angka 5, dalam keputusan Kapolri Nomor KEP/698/XII/2011, pelaksanaan seleksi kesamaptaan dibedakan jenis/metode dan sistem penilaiannya berdasarkan jenis kelamin (pria dan wanita). Hal ini sesuai dengan alokasi formasi yang tersedia (kuota pria dan/ atau kuota wanita). Bagi peserta wanita yang sedang hamil, tidak ada perlakuan khusus dalam seleksi kesamaptaan, apabila tetap bersedia mengikuti seleksi maka wajib membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh suami yang menyatakan bersedia menanggung segala resikonya dan tidak akan menuntut kepada panitia.
7. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
8. Bagi peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan atau Kartu Keluarga dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
9. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi / dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan / data pelamar atau pendaftar atau peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan / atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani / tidak benar, maka panitia seleksi menggugurkan kelulusan pelamar/pendaftar/peserta/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bersangkutan

10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
11. Apabila dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya.;
12. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
13. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
14. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pendaftar / peserta menjadi milik panitia sehingga panitia dapat tidak memberikan kembali data/dokumen tersebut apabila diminta oleh pendaftar/peserta
15. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dilaman <http://cpns.kemenkumham.go.id>
16. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Tahun 2018 dapat menghubungi Call Center yang dapat dihubungi:
 - Telepon (021) 5253004 (ext 310) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB atau melalui Twitter @cpnskumham / @Kemenkumham_RI ;
 - Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 di akun Telegram @cpnskumham (tidak menerima panggilan telepon hanya teks/gambar/video)



**Daftar Alamat PO. Box Pelaksanaan Seleksi CPNS (Bagi SLTA Sederajat)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2018**

NO	NAMA KANTOR WILAYAH	ALAMAT PO. BOX
1.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh	PO. Box 123 BNA 23114
2.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	PO. Box 1169
3.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat	PO. Box 154 PADANG Kode Pos 25000
4.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau	PO. Box 2277 Pekanbaru
5.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau	PO. Box 32 Tanjungpinang 29100
6.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	PO. Box 5555 Palembang 30000
7.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi	PO. Box 132 KODE POS : 36000
8.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung	PO. Box 1235 BDL 35000
9.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu	PO. Box 3811/BN 38225
10.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung	PO. Box 3555 PKP
11.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	PO. Box 4555 / JKTM 12700
12.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten	PO. Box 1212 SERANG
13.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat	PO. Box 234 KUMHAM JABAR KODE POS:40000
14.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	PO. Box 888/ SM 50000
15.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakarta	PO. Box 1100 YOGYAKARTA 55000
16.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur	PO. Box 1277 SB
17.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat	PO. Box 78027
18.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	PO. Box 111/BJM 70000
19.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah	PO. Box 3150/PLK 73000
20.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur-Kalimantan Utara	PO. Box 1412 Samarinda 75001
21.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara	PO. Box 6161 Manado
22.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah	PO. Box 7717 KODE POS 94231
23.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	PO. Box 1219
24.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	PO. Box 888/SULBAR 91500
25.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	PO. Box 930 KUMHAM SULTRA KODE POS 93000
26.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo	PO. Box 3131/Gt/36100
27.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali	PO. Box 3064
28.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat	PO. Box 1059 Mataram 83127
29.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	PO. Box 85001 KODE POS 85000
30.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku	PO. Box 1001 KODE POS 97115
31.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	PO. Box 111/KUMHAM
32.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua	Tromol Pos 12, abepura
33.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat	PO. Box 983 KODE POS 98312

**Jadwal Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM
Tahun 2018.**

A. Jadwal Seleksi Kualifikasi Pendidikan Magister, Dokter, Sarjana/S-1/ D-IV dan Diploma III/ D-III

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	19 September 2018
2.	Pendaftaran Online (https://sscn.bkn.go.id) dan unggah Dokumen	26 September – 7 Oktober 2018
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	11 Oktober 2018
4.	Cetak nomor ujian secara online	12 Oktober – 22 Oktober 2018
5.	Verifikasi jenis/ tingkat Disabilitas dan Pemberian Kartu Peserta Ujian (khusus formasi Penyadang Disabilitas)	15 Oktober - 17 Oktober 2018
6.	Seleksi Kompetensi Dasar	23 Oktober - 24 Oktober 2018
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (CAT) dan peserta yang mengikuti SKB	1 November 2018
8.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) (CAT)	6 November – 7 November 2018
9.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Praktek komputer dan Bahasa Inggris (Khusus Pengelola Teknologi Informasi) ; Praktek Mengajar dan Bahasa Inggris (Khusus Dosen)	8 November - 9 November 2018
10.	Seleksi Kompetensi Bidang melalui Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan	13 November – 15 November 2018
11.	Pengumuman kelulusan akhir secara online	30 November 2018
12.	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	4 Desember – 7 Desember 2018

B. Jadwal Seleksi Kualifikasi Pendidikan SLTA Sederajat

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman	19 September 2018
2.	Pendaftaran Online (https://sscn.bkn.go.id)	26 September – 7 Oktober 2018
3.	Penerimaan dokumen persyaratan melalui PO. Box	26 September - 8 Oktober 2018 (pukul 16.00)
4.	Pengumuman hasil verifikasi dokumen PO. Box pada seleksi administrasi	11 Oktober 2018
5.	Pemanggilan / Verifikasi Dokumen atau Berkas Asli , Pengukuran Tinggi Badan pada seleksi administrasi dan Pemberian Kartu Peserta Ujian	15 Oktober – 17 Oktober 2018
6.	Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)	25 Oktober - 26 Oktober 2018

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (CAT) dan Peserta yang mengikuti SKB	1 November 2018
8.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan	21 November – 23 November 2018
9.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) melalui Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan	26 November – 27 November 2018
10.	Pengumuman kelulusan akhir secara <i>online</i>	30 November 2018
11.	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	4 Desember – 7 Desember 2018

Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <http://cpns.kemenkumham.go.id>



Jakarta, 18 September 2018

Sekretaris Jenderal,
Selaku Ketua Panitia Seleksi,

Bambang Rantam Sariwanto
NIP 196012151988021001